
Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung

¹Rahayu Kusumadewi, ²Veren Virginia

¹Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
rahayukusumadewi@yahoo.com

²Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
verenvirginiakandio@gmail.com

Abstract

Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. Asset informaton in the balance sheet, describes the conditons of economic wealth owned by the local government. However, in the Bandung City Revenue Management Agency SKPD report, there was a decrease in the absolute value of the asset component, namely in the account of fixed assets, current assets and total assets. The purpose of the study was to analyze assets in the BPPD Bandung financial statements after a change in nomenclature, and to find out how the financial condition of Bandung BPPD, the ability of Bandung BPPD fulfill its obligations, and any indcators underlying the declnei in assets using ratios, includng; (1) Liquidty Ratoi, (2) Solvability Ratoi; and (3) Debt Ratio. Using descriptive-qualitative methods. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indcate that, after a change in nomenclature, changes in the basis of measurement underlying the preparation of financial statements, namely a combinaton of cash and accrual basis. The financial condition of the Bandung City BPPD 2016-2017, in fulfillng its oblgations in prime condition. Judging from financial ratios, in the form of liquidity ratios, solvency ratios, and debt ratios, Bandung BPPD has a very good value between the comparison of assets and liabilities. The decrease in current assets was influenced by the increase in tax receivables. Thus, the increase in tax receivables affects the increase in allowance for tax receivables. This is caused by bad tax receivables. The decrease in fixed assets is affected by the transfer of fixed assets to other asset accounts. This is because the condition of fixed assets is damaged and is not feasible to be used as a fixed asset. Fixed assets that were severely damaged reached 11.3 M.

Keywords: *BPPD, Nomenclature Change, Liquidity Ratio, Solvability Ratio, Debt Ratio.*

Pendahuluan

Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, keuangan daerah merupakan amanah yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengelola urusan keuangannya sendiri dengan menjunjung asas tranparansi dan akuntabilitas. Siregar (2015) mendefenisikan keuangan daerah sebagai hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keuangan daerah termasuk pada pendapatan dan pengeluaran negara yang nantinya

=====

dapat diubah dalam bentuk aset milik daerah. Aset milik daerah ini salah satunya terdapat pada satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian perlu adanya analisis terkait kondisi aset pada SKPD Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kota Bandung.

Sedangkan menurut Suwanda (2015) bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam pengertian ini dipahami bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terdapat lima komponen laporan keuangan yang diantaranya adalah LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK.

Selanjutnya menurut Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Rasio keuangan ini menjadi bagian dari analisis aset yang didalamnya terdapat komponen rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang. Menurut Wild, dkk (2003) rasio likuiditas yang dimaksud adalah jumlah uang tunai atau setara kas yang dimiliki suatu entitas dan jumlah uang tunai yang dapat diperolehnya dalam waktu singkat untuk memenuhi kewajibannya. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja (Mahmudi, 2016). Untuk melakukan analisis likuiditas ini ada beberapa rasio yang digunakan diantaranya :

Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio kas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio cepat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio modal kerja terhadap aset total dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Working Capital to Total Assets} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas yang menurut Mahmudi (2016) dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun

jangka panjang. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya (Kasmir, 2014).

Rasio solvabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

Selanjutnya yang ketiga adalah rasio utang yang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Terdapat beberapa jenis rasio utang yang perlu diketahui, antara lain:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

$$\text{Rasio Utang Terhadap Aset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

Dalam rangka mendorong sikap akuntabilitas kerja, sebuah penyajian laporan keuangan diminta untuk dapat menyesuaikan dengan beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta disajikan secara proporsional. Adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan umum dari pelaporan keuangan, dan agar pengguna (*user*) dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya. Sejumlah informasi yang tertulis dalam LKPD tersebut perlu mengandung setidaknya empat aspek mendasar, yaitu andal, dapat dipahami, relevan, dan dapat dibandingkan. Suwanda (2015) berpendapat bahwa salah satu media yang berfungsi untuk mendorong lahirnya suatu transparansi dan akuntabilitas publik adalah dengan menyajikan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang holistic dan komprehensif.

Apabila melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka sejumlah informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu harus jelas, tegas, terang, dan informatif. Hal tersebut tentunya diharapkan agar masyarakat atau publik sebagai pengguna (*user*) dapat terpenuhi kebutuhan informasinya. Penyusunan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang relevan dan tepat tentang kondisi keuangan serta segala aktivitas transaksi lainnya yang dijalankan oleh otoritas tertentu yang menjalankan tugas pelaporan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. LKPD ini juga dilakukan karena fungsinya sebagai dasar dan sumber dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga laporan tersebut perlu dibuat dan didesain dengan baik, praktis, jelas, terang dan sederhana mungkin dalam upaya memudahkan orang yang berkepentingan atau bahkan masyarakat pada umumnya untuk menangkap dan memahami isi kandungan laporan tersebut. Suwanda (2015) menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan keuangan di tingkat Pemerintah Pusat;
2. Laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah;

3. Laporan keuangan di setiap satuan organisasi tingkat pusat dan daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam rangka menjalankan amanah peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bandung berkewajiban untuk menyusun suatu laporan keuangan tahun anggaran 2017 sebagai perwujudan dalam menjalankan prinsip akuntabilitas kerja pemerintah. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai entitas yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, maka mereka perlu mempertanggung jawabkannya kepada khalayak publik. Untuk itu, salah satu upaya dalam mewujudkan laporan keuangan BPPD Kota Bandung yang kredibel dan profesional, maka pemerintah perlu menyusun suatu laporan neraca keuangan yang baik dan tepat.

Salah satu elemen dari laporan neraca keuangan tersebut, yaitu Aset pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah ini menyediakan sejumlah informasi yang menerangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan potensi dan sumber keuangan Kota Bandung yang kemudian dikelola oleh pemerintahannya. Melalui laporan neraca keuangan ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau bahkan masyarakat pada umumnya sebagai pembaca laporan keuangan dapat melihat kondisi riil dari kekayaan pemerintah daerah yang disimbolkan dalam misalnya jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Namun, pada laporan SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, terjadi penurunan pada komponen aset dalam neraca sebagaimana table berikut ini:

Tabel 1.1

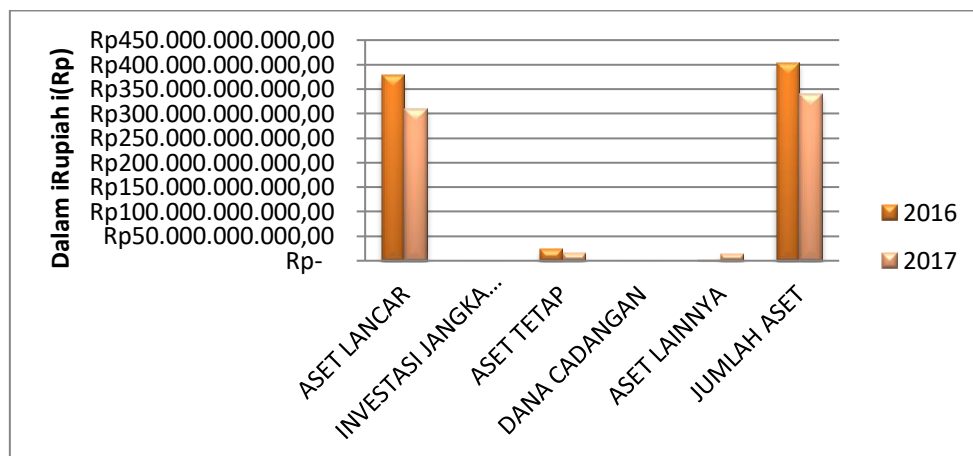
Persentase Pencapaian Akun Aset Pada Neraca BPPD Kota Bandung 2016-2017

NAMA AKUN	2016	2017	%
ASET LANCAR	Rp 377,498,757,350.31	Rp 310,672,119,408.90	82%
INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp -	Rp -	
ASET TETAP	Rp 24,323,932,834.00	Rp 14,986,514,125.00	62%
DANA CADANGAN	Rp -	Rp -	
ASET LAINNYA	Rp 1,685,413,000.00	Rp 13,820,313,073.00	820%
JUMLAH ASET	Rp 403,508,103,184.31	Rp 339,478,946,606.90	84%

(Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung 2017, data diolah oleh penulis)

Gambar 1.1

Persentase Pencapaian AkunAset Pada Neraca BPPD Kota Bandung 2016-2017



(Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung 2017, data diolah oleh penulis)

Dari tabel 1.1 dan gambar 1.1, dapat dilihat perbandingan pencapaian jumlah aset di tahun 2017 dan 2016 aset lancar hanya 82%, BPPD Kota Bandung tidak memiliki investasi jangka panjang di tahun 2016 maupun di tahun 2017, aset tetap 62%. BPPD Kota Bandung tidak memiliki dana cadangan di tahun 2017 dan 2016, kenaikan pada jumlah akun aset lainnya hingga 820%, namun pada jumlah total aset hanya mencapai 84%. Kemudian pada grafik 1.1 diagram batang berwarna merah tua menunjukkan jumlah aset pada tahun 2016 sedangkan diagram batang berwarna merah muda menunjukkan jumlah aset pada tahun 2017. Seperti yang terlihat pada grafik, bahwa terjadi penurunan jumlah aset pada akun aset lancar, aset tetap, dan jumlah total keseluruhan aset.

Diindikasikan dengan adanya perubahan nomenklatur, yang semula Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang beralamat di Jl. Cianjur No. 24 Bandung, namun kini menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang menjadi bagian kompleks pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No.2 Bandung. Pasalnya, perubahan ini terkait dengan pemindahan gedung dan harta kekayaan dikantor sebelumnya, yang kini berubah nilainya secara signifikan di gedung kantor yang baru. Membandingkan data neraca dua periode atau lebih bertujuan untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan jumlah absolut (dalam rupiah) dan dalam persentase. Analisis perbandingan tersebut biasanya juga dilengkapi dengan rasio. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah rupiah tahun sebelumnya sebagai tahun dasar (Jumingan, 2014:45).

Melihat kondisi penurunan total aset secara signifikan pada laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung tersebut, membuat penulis tertarik untuk menelitinya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset Pemerintah Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-2017.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terkait, serta studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer seperti Laporan Keuangan BPPD Kota Bandung 2016-2017, Laporan hasil wawancara, Profil dan data pegawai BPPD Kota Bandung. Sedangkan data sekunder lainnya adalah Dokumen resmi yang diambil melalui website BPPD Kota Bandung, Foto-foto dokumentasi, serta catatan hasil observasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dalam penelitian ini penyajian data juga menggunakan rasio keuangan diantaranya; rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang.

Hasil Dan Pembahasan

Setelah adanya perubahan nomenklatur, adanya perubahan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Beberapa perubahan basis pengukuran yang memengaruhi laporan neraca diantaranya, penyusunan Neraca Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*), sebelum perubahan nomenklatur seluruhnya menggunakan basis akuntansi kas. Namun setelah adanya perubahan nomenklatur yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat iperolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam memenuhi kewajibannya dilihat dari rasio likuiditas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

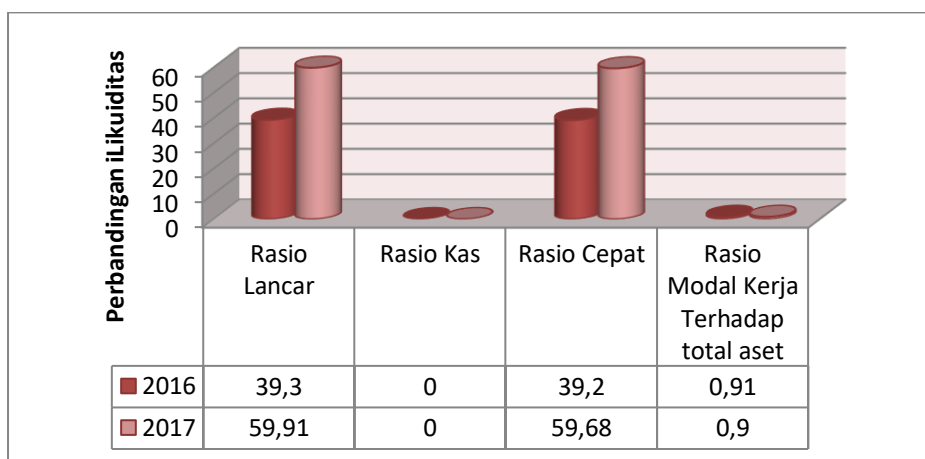
Tabel 3.1
Tabel Rasio Likuiditas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017

Rasio Likuiditas	Tahun 2016	Tahun 2017
Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	39.3 : 1	59.91 :1
Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	0	0
Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	39.2 : 1	59.68 : 1
Rasio Keuangan	Tahun 2016	Tahun 2017
Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (<i>working capital to total assets ratio</i>)	0.91 : 1	0.9 : 1

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

Apabila dibandingkan rasio likuiditas ditahun 2017 lebih likuid dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pada rasio kas (*ratio cash*) menunjukkan tidak adanya perubahan pada kondisi LKPD BPPD Kota Bandung yang masih nilainya 0 pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan BPPD Kota Bandung di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak memiliki kas dan investasi jangka pendek. Meskipun demikian, BPPD Kota Bandung harus mengantisipasi kemungkinan kondisi keuangan yang terlalu likuid. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 3.1
Diagram Rasio Likuiditas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017



(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

Rasio likuiditas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-2017 pada diagram diatas dalam kondisi prima. Dimana BPPD Kota Bandung mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Hal ini didominasi oleh rasio lancar (*current ratio*) di tahun 2016 adalah 39,3 sedangkan ditahun 2017 yakni 59,91 dan rasio cepat (*quick ratio*) pada tahun 2016 adalah 39,2 sedangkan pada tahun 2017 yakni 59,68. Mahmudi (2016: 110) mengatakan bahwa rasio cepat merupakan salah satu ukuran terbaik , lebih menarik daripada rasio lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah BPPD Kota Bandung dapat membayar utangnya dengan cepat. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat untuk membentuk kas, karena pada umumnya memerlukan dua tahap lagi untuk dirubah menjadi kas. Pertama , menjual dan menjadi piutang. Kedua, menagih piutang dan surat berharga. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Dengan demikian kondisi kesehatan keuangan BPPD Kota Bandung dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dinilai sangat likuid.

Kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilihat dari rasio solvabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas BPPD Kota Bandung
Tahun 2016-2017

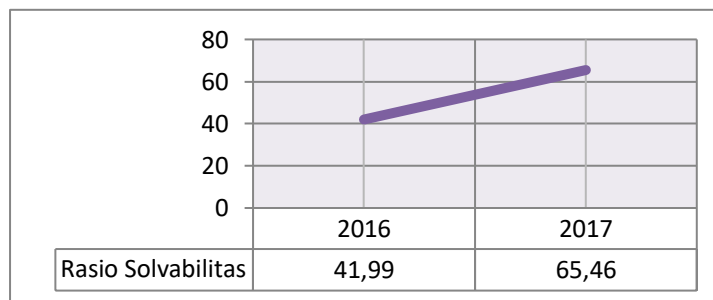
Tahun	Total Aktiva	Total Utang	Rasio Solvabilitas
2016	Rp 403,408,103,184.31	Rp 9,606,293,933.50	41.99
2017	Rp 339,478,946,606.90	Rp 5,185,802,982.92	65.46

(Sumber : Laporan Keuangan BPPD Kota Bandung tahun anggaran 2016-2017, Data Diolah Oleh Peneliti, 2019)

Berdasarkan tabel diatas perbandingan total aktiva dan total utang pada rasio solvabilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2016 adalah 41.99 : 1 artinya setiap 1 rupiah seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dapat dijamin oleh 41.99 rupiah total aktiva yang dimiliki oleh BPPD Kota Bandung. Sedangkan perbandingan rasio solvabilitas di tahun 2017 adalah 65.46: 1 artinya setiap 1 rupiah seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dapat dijamin oleh 65.46 rupiah total aktiva yang dimiliki oleh BPPD Kota Bandung. Agar lebih jelas dapat diamati pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. 1

Diagram Rasio Solvabilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017



(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan jaminan yang dapat dipenuhi oleh BPPD Kota Bandung dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dilihat dari rasio solvabilitas. Ditahun 2016 diangka 41.99 dan naik di tahun 2017 sekitar 23.47 menjadi 65.46 perbandingannya. Hal ini dipengaruhi juga dengan penurunan nominal total utang ditahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.4 ditahun 2016 total utang adalah Rp. 9,606,293,933.50 menjadi Rp. 5,185,802,982.92 ditahun 2017. Namun terjadi penurunan nominal juga pada total aktiva, yang semula di tahun 2016 adalah Rp. 403,408,103,184.31 dan di tahun 2017 menjadi Rp. 339,478,946,606.90. Meskipun demikian penurunan ini tidak mengarah pada resiko solvabel dengan melihat perbandingan rasio solvabilitas. Dengan demikian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dapat dikatakan solvabel

karena perbandingan rasio mencapai 65.46 : 1 dari angka standarnya 2:1

Sedangkan hasil perhitungan rasio utang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.3
Hasil Perhitungan Rasio Utang (*Leverge Ratio*) BPPD Kota Bandung Tahun 2016-2017

Rasio Utang	Tahun 2016	Tahun 2017
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0.02 : 1	0.02 : 1
Rasio Utang Terhadap Aset Modal	039 : 1	0.35 : 1

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

Gambar 3.2
Diagram Rasio Utang (*Leverge Ratio*) BPPD Kota Bandung Tahun 2016-2017



(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019)

Berdasarkan diagram diatas, rasio utang terhadap ekuitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung yang relatif rendah dan nilainya sama pada dua periode anggaran 2016-2017 yakni 0.2. Artinya apabila total utang dibebankan pada ekuitas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung hanya terbebani 0.02 atau 2% baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017. Sedangkan pada rasio utang terhadap aset modal terjadi penurunan dimana nilai dan persentase ditahun 2017 menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya. Rasio ini menggambarkan di tahun 2016 sebanyak 0.39 atau 39% dan di tahun 2017 0,35 atau 35% bagian aset modal BPPD Kota Bandung dapat digunakan untuk menjamin utang aset modal dalam hal ini diproksikan dengan aset tetap. Namun sesuai peraturan, dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah tidak dibenarkan menjadikan aset modal pemerintah daerah sebagai jaminan.

Apabila dalam perhitungan rasio utang, nilai aset BPPD Kota Bandung masih dalam relatif aman untuk pengajuan pinjaman. Menurut Kepala Bagian Keuangan BPPD Kota Bandung, ada mekanisme tersendiri untuk melakukan pinjaman, dengan

alur yang panjang bagi Pemerintah Daerah. Namun untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada dibawah Pemerintahan Kota Bandung, yang sudah jelas tidak diperbolehkan untuk melakukan pengajuan pinjaman. Namun apabila ada prioritas percepatan pembangunan dalam skala pemerintah daerah, ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengajuan pinjaman, dengan persetujuan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, semua pemerintah kabupaten/kota belum ada yang melakukan pengajuan pinjaman daerah, karena dana yang digunakan untuk oprasional pemerintah daerah, khususnya Kota Bandung bersumber dari APBD dan PAD masih tercukupi.

Indikator Yang Menyebabkan Penurunan Aset Yang Signifikan Pada BPPD Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 dapat di lihat dari tabel 1. 1, dapat diketahui penurunan nilai aset BPPD Kota Bandung pada neraca, terdapat pada akun aset lancar hanya mencapai 82% dari tahun sebelumnya , aset tetap mencapai 62 % dari tahun sebelumnya, dan nilai aset secara keseluruhan yang hanya mencapai 84% dari tahun sebelumnya.

Penurunan aset lancar sebesar 18% dipengaruhi oleh kenaikan piutang pajak. Dengan demikian, naiknya piutang pajak memengaruhi kenaikan penyisihan piutang pajak. Menurut Kepala Bagian Sub Keuangan dan Pelaksana Bagian Sub Keuangan, ini diakibatkan oleh piutang pajak yang macet. Saldo piutang pajak netto per 31 Desember 2017 sebesar Rp 301,801,974,561.14 merupakan piutang pajak yang belum terima pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Penyisihan Piutang Pajak Daerah BPPD Kota Bandung Tahun 2016-2017

No	Uraian	Jumlah	
		Per 31-12-2017	Per 31-12-2016
1	Piutang Pajak Daerah	Rp 1,004,099,286,739.04	Rp 991,930,373,515.64
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Rp (702,297,312,177.90)	Rp (623,131,342,764.45)
Jumlah Piutang Pajak Netto		Rp 301,801,974,561.14	Rp 368,799,030,751.19

(Sumber: Dokumen CALK BPPD Kota Bandung 2017)

Penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 702,297,312,177.90 diperoleh dari perhitungan berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

Selain pada aset lancar, penurunan lain juga ada pada aset tetap. Dari data tabel 1.1 imenunjukkan, bahwa jumlah aset tetap yang menurun dari tahun 2016 ke 2017 isangat isignifikan. Menurut Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan imenyatakan, penurunan aset ini dipengaruhi oleh pemindahan aset tetap pada akun aset lainnya. Hal ini dikarenakan kondisi aset tetap yang rusak dan sudah itidak layak dijadikan sebagai aset tetap. Aparat pelaksana inventarisasi dalam rangka itertib administrasi pengelolaan barang milik daeraah yang meliputi pembukuan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pada masing-masing SKPD (Sholeh & Rocmansjah, 2010).

Pemindahan aset tetap pada akun aset lainnya, sebagaimana sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 79 menyatakan bahwa, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tabel dibawah ini menunjukkan inventarisasi aset tetap yang dimasukan pada akun aset lainnya, sebagai berikut:

Tabel 3.5

Inventarisasi Aset Tetap pada Aset Lainnya BPPD Kota Bandung Tahun 2017

Uraian Hasil Inventarisasi	Pengaruh Tambah/ (Kurang) / Tidak Berpengaruh	Jumla Rekap Aset Tetap Ke Neraca	Aset Lainnya
Rusak Berat	(-) Relaks Ke Aset Lainnya	Rp 11,302,097,010.00	Rp 11,302,097,010.00
Hilang (harus ada bukti laporan polisi)	(-) Relaks Ke Aset Lainnya	Rp 143,062,362.00	Rp 143,062,362.00
Tidak diketahui keberadaannya (dibawah 5 juta dengan umur teknis 10 tahun)	(-) Relaks Ke Aset Lainnya	Rp 689,740,701.00	Rp 689,740,701.00
Barang Sudah Dihancurkan Masih Tercatat	(-) Relaks Ke Aset Lainnya	-	-

(Sumber : Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung 2017)

Berdasarkan tabel diatas, aset tetap yang mengalami rusak berat mencapai 11,3 M. Menurut keterangan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan BPPD Kota Bandung, seharusnya dilakukan penghapusan pada aset tetap yang mengalami rusak berat. Namun hingga saat ini belum ada SK dan regulasi mengenai penghapusan aset di BPPD Kota Bandung. Sehingga aset tetap yang rusak berat masuk pada akun aset lainnya.

Simpulan

Kondisi keuangan BPPD Kota Bandung Tahun 2016-2017, dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya dalam keadaan prima. Dilihat dari rasio keuangan, berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang, BPPD Kota Bandung memiliki nilai yang sangat baik antara iperbandingan iaset dan ikewajiban. Penurunan aset lancar dipengaruhi oleh kenaikan piutang pajak. Dengan demikian, naiknya piutang pajak memengaruhi kenaikan penyisihan piutang pajak. Ini diakibatkan oleh piutang pajak yang macet. Saldo piutang pajak *netto* per 31 Desember 2017 sebesar Rp301,801,974,561.14 imerupakan piutang pajak yang belum terima ipembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Penurunan aset tetap dipengaruhi oleh pemindahan aset tetap pada iakun aset ilainnya. Hal ini dikarenakan kondisi aset tetap yang rusak dan sudah tidak layak dijadikan isebagai aset tetap. Aset tetap iyang imengalami irusak berat mencapai 11,3 M. Seharusnya dilakukan penghapusan pada aset tetap yang mengalami rusak berat. Namun hingga saat ini belum ada SK dan regulasi mengenai penghapusan aset di BPPD Kota Bandung. Sehingga asset tetap yang rusak berat masuk pada akun aset lainnya.

Referensi

- Basri, S. (2015). *Teori Pengeluaran Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Jumingan. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. iBandung. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2016. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuarisa, S.A. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal. Vol .2 No.1.
- Putra, F. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ejournal unp. Vol 5. No 1: Seri C: 2252-6765.
- Rochmatullah, M.R, Hartanto, R. Arifin, A. (2016) *Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 17 No. 2: 1411- 6081.
- Satori, D., Komariah, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Simamora, S. (2014). *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Prespektif Teoritis*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 14 No. 2.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Soleh, C., Heru, R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunarno, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwanda, D. (2015). *Sistem, Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: PPM Management.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Umam, K. (2012). *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wild, J.J., dkk. (2003). *Financial Statement Analysis. Eight Edition*. Singapore: McGraw Hill